

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI ANTARA KONSUMEN DENGAN PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA ATAS PENGIRIMAN MINUMAN BERALKOHOL

Raafi Wiragati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

raafiwiragati@gmail.com

Arinto Nugroho, S.Pd., S.H., MH.

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

arintonugroho@unesa.ac.id

Abstrak

Perjanjian ketentuan penggunaan antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang mencantumkan suatu klausula ketentuan penggunaan aplikasi atas pengiriman minuman beralkohol. Pencantuman klausula tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 dan Pasal 173 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang bersifat imperatif, sebagaimana dinyatakan bahwa minuman beralkohol dapat dikategorikan dalam cairan atau barang yang mudah menyala dan meledak sehingga dalam pengangkutannya menggunakan jenis alat angkutan barang khusus. Sedangkan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi yang menyediakan jasa transportasi, sehingga tidak memiliki izin dalam hal mengangkut barang yang dikategorikan jenis barang khusus. Penelitian ini mengkaji tentang pengiriman minuman beralkohol tidak batasan umur saja yaitu 21 tahun melainkan juga melihat dari segi alat angkut yang menggunakan jenis alat angkutan khusus karena minuman beralkohol dapat dikategorikan jenis cairan yang mudah menyala dan meledak serta perusahaan pengangkutan barang khusus diharuskan memiliki izin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pencantuman klausula ketentuan penggunaan aplikasi pada perjanjian antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atas pengiriman minuman beralkohol dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU LLAJ. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian ketentuan penggunaan aplikasi antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang mencantumkan klausula atas pengiriman minuman beralkohol tidak sesuai dengan Pasal 168 dan 173 UU LLAJ. Hal ini disebabkan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak memenuhi persyaratan sebagai perusahaan angkutan umum yang memiliki izin angkutan khusus sebagaimana di atur pada Pasal 168 dan Pasal 173 UU LLAJ. Akibat hukum dari ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan pada perjanjian ketentuan penggunaan aplikasi antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tersebut ialah batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dijelaskan pada pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian dan dianggap perjanjian pengiriman minuman beralkohol tersebut tidak pernah ada.

Kata Kunci: Perjanjian, Konsumen, Pengiriman Minuman Beralkohol

Abstract

The Agreement between consumer and PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa includes a clause of alcoholic beverages. The inclusion of the clause is considered to be contrary with the regulation Article 168 and Article 173 Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic And Road Transport (TaRT Law), as stated in category alcoholic beverages which categorized as liquids or flammable and explosive goods, as for it the carrier have to use a special kind of vehicle not any kinds of vehicle. This research is specifically discuss about the inclusion of alcoholic beverages clause which not only limited by age 21 years old but to observe from the transportation sides which used a special kinds of vehicle because alcoholic beverages can be categorized as a flammable and explosive liquids. The purpose of this research is to find out the accordance between the inclusion of clauses agreement between the consumer with PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa which include a clause for alcoholic beverages shipment with provisions as provided in TaRT Law, and the legal consequences. This research used normative law type of research with an approach of statute and conceptual approach. The types of legal materials used consist of primary, secondary, and non-legal materials. Technique used to collect legal materials is literature study. The analysis technique uses in this research is prescriptive method. The result of this research indicate that the agreement between consumer and PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa which state the clause of alcoholic beverages shipment with only an age limit is not in accordance with the provisions of Article 163 and Article 178 of TaRT law. This is due

to PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa does not have the transportation requirement described in Article 163 and Article 178 of TaRT law. The legal consequences for inclusion of this clause in agreement between consumer with PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa is null and void and the inclusion of alcoholic beverages shipment clause is considered never existed.

Keywords: Agreement, Alcoholic Beverages Shipment, Transportation.

PENDAHULUAN

Pengangkutan atau biasa disebut dengan transportasi, merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. (Setiawan Widagdo, 2012; 413). Jika dilihat dari segi geografisnya, Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga peranan pengangkutan sangat penting. Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, memungkinkan pengangkutan dapat dilakukan melalui darat, laut, dan udara agar menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Di dalam perkotaan, pertumbuhan populasi penduduk selalu menunjukkan kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk di perkotaan bukan hanya akan menyebabkan bertambahnya penduduk yang bertempat tinggal dan bekerja di daerah perkotaan, namun akan diiringi dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang digunakan oleh penduduk sebagai alat transportasi, dalam hal ini transportasi darat.

Transportasi darat di dalam perkotaan dan daerah sekitarnya yang efektif dan efisien akan menentukan efisiensi industri, kelancaran perdagangan dan perniagaan, serta berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan di segala aspek. Dengan kata lain, seluruh aspek dari kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh kemajuan di bidang transportasi, yang kemudian akan mempengaruhi arus lalu lintas barang dan penumpang. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan transportasi yang tepat. Khususnya mengenai pemindahan barang, yang berpengaruh pada kualitas jasa transportasi barang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan lancar, aman, teratur, bertanggungjawab, dan murah. Dengan semua kualitas pelayanan tersebut, para pengguna jasa transportasi dapat menentukan jenis sarana transportasi apa yang sangat sesuai baginya untuk digunakan.

Pada awal tahun 2015, di Indonesia telah hadir perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi yang menyediakan jasa layanan pada bidang transportasi, yakni *Go-Jek* yang berada dalam naungan suatu perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. *Go-Jek* merupakan jasa transportasi yang menggunakan kendaraan roda dua

(sepeda motor) dan biasa disebut ojek. *Go-jek* hadir dengan dasar bahwa ojek yang biasanya hanya mangkal di pos-pos tertentu bisa terkoordinir dan terintegrasi untuk melayani masyarakat dengan cepat dan sigap via *online booking*. Oleh karena itu, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa menghadirkan jasa transportasi alternatif tersebut ke dalam bentuk aplikasi *mobile*.

Go-Jek berbeda dengan ojek biasa, karena *Go-Jek* menggunakan aplikasi *online* yang cara pemesanannya hanya dapat dilakukan melalui aplikasi *Go-Jek* di telepon pintar saja. Selain itu, *Go-Jek* tidak hanya melayani jasa angkutan orang seperti ojek pada umumnya, melainkan juga melayani jasa angkutan barang, dan bahkan juga menyediakan pesan antar makanan di toko-toko tertentu. Secara keseluruhan pada aplikasi *Go-Jek* terdapat tujuh layanan, diantaranya: 1. *Go-Send* yaitu layanan pengiriman barang, 2. *Go-Food* yaitu layanan pesan antar makanan, 3. *Go-Shop* yaitu layanan pesan antar belanjaan, 4. *Go-Ride* yaitu layanan angkutan orang menggunakan sepeda motor, 5. *Go-Car* yaitu layanan angkutan orang menggunakan mobil, 6. *Go-Pulsa* yaitu layanan pengisian *top up* pulsa, 7. *Go-Clean* yaitu layanan untuk membersihkan rumah.

Layanan yang ditawarkan *Go-Jek* tersebut memudahkan masyarakat dalam kegiatan pengangkutan di tengah keadaan perkotaan yang sering mengalami kemacetan. Selain itu, dalam *Go-Jek* terdapat layanan baru yang disediakan yaitu *Go-Send* merupakan inovasi baru dalam hal pengangkutan barang, karena dapat mengantarkan barang dalam waktu yang lebih cepat.

Pada saat konsumen mengunduh aplikasi *Go-Jek* terdapat ketentuan penggunaan yang mana harus disetujui oleh setiap orang yang mengunduhnya. Ketentuan penggunaan ini merupakan suatu perjanjian antara pemilik aplikasi dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan layanan yang disediakan oleh perusahaan. Dengan adanya perjanjian maka disitulah muncul suatu perikatan. Perikatan lahir baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang. Perikatan yang bersumber dari perjanjian ini pada prinsipnya mempunyai akibat hukum yang sama dengan perikatan yang bersumber karena undang-undang. Dasar hukum dari kekuatan suatu perjanjian tersebut adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, pada saat perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat sahnya

perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal.”

Pada prinsipnya para pihak dalam perjanjian mempunyai kebebasan menentukan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal pengangkutan. Berkaitan dengan suatu perjanjian tersebut terdapat suatu ketentuan penggunaan dalam menggunakan layanan yang disediakan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang mana ketentuan penggunaan tersebut bersifat mengikat pengguna harus mematuhi ketentuan penggunaan tersebut karena itu merupakan suatu perjanjian bagi mereka para pihak telah sepakat dengan menyetujui adanya layanan yang disediakan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa.

Dalam ketentuan penggunaan layanan tersebut terdapat beberapa yang menimbulkan suatu problematika diantaranya yaitu pada angka 28 perjanjian ketentuan penggunaan antara konsumen dengan PT. aplikasi Karya Anak Bangsa yang menyatakan bahwa “Penyedia layanan hanya akan mengirimkan minuman beralkohol untuk pelanggan yang berusia diatas 21 tahun. Anda setuju untuk menunjukkan kartu identitas (KTP) anda untuk diperiksa oleh penyedia layanan pada saat pengiriman.”

Selanjutnya pada angka 29 perjanjian ketentuan penggunaan antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang juga menyebutkan bahwa “ anda memahami dan mengakui bahwa dengan memilih pada halaman pop-up pemeriksaan usia saat memasuki toko minuman beralkohol atau menambahkan minuman beralkohol ke troli, anda memastikan bahwa anda telah melebihi batas usia yang sah untuk mengkonsumsi minuman beralkohol.”

Pengaturan lebih lanjut tentang merek tertentu dari minuman beralkohol diatur pada angka 30 perjanjian ketentuan penggunaan antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa bahwa “Semua bir (Bintang dan Heineken) di toko bir Bintang (Bintang Store) akan dikirimkan dari toko terdekat, tidak langsung dari toko Bir Bintang.”

Pada penjelasan diatas sebenarnya batasan minuman beralkohol tidak terpaku pada usia saja. Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (selanjutnya disebut Perpres Minuman Beralkohol) yang menjelaskan bahwa “Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor di kelompokkan dalam golongan sebagai berikut: a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) kadar sampai dengan 5% (lima persen), b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol

(C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen), dan c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Selain jenis golongan dari minuman beralkohol dalam Perpres Minuman Beralkohol juga dijelaskan mengenai tempat-tempat tertentu yang hanya dapat menjual minuman beralkohol tersebut, yaitu pada Pasal 7 Perpres Minuman Beralkohol yang menjelaskan bahwa “Minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di; a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan, b. toko bebas bea, dan c. tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/walikota dan Gubernur untuk daerah Khusus Ibukota Jakarta.”

Selain dua peraturan perundang-undangan diatas, terdapat Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ). Pada pasal 160 UU LLAJ mengatur bahwa terdapat angkutan barang umum dan juga angkutan barang khusus. Dalam pasal 160 UU LLAJ yang dimaksud dengan angkutan barang khusus adalah angkutan yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan alat berat serta membawa barang berbahaya, antara lain : a. barang yang mudah meledak, b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu, c. cairan mudah menyala, d. padatan mudah menyala, e. bahan penghasil oksidan, f. racun dan bahan yang mudah menular, g. barang yang bersifat radioaktif, dan h. barang yang bersifat korosif.

Dalam penjelasan pasal 160 UU LLAJ minuman beralkohol dapat dikategorikan pada jenis cairan yang mudah menyala dan mudah meledak, karena di dalam minuman beralkohol terdapat suatu senyawa yaitu etil alkohol atau etanol yang pada dasarnya cairan tersebut digunakan untuk bahan bakar. Sehingga ketika merujuk pada pasal 160 UU LLAJ ketika barang tersebut masuk dalam kategori barang yang mudah menyala dan mudah meledak maka dalam pengangkutannya harus menggunakan jenis alat angkut khusus.

Selanjutnya jika ditinjau dari Pasal 173 ayat (1) huruf c UU LLAJ yang menjelaskan bahwa “ Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat.” Dalam konteks pengangkutan barang, merujuk pada Pasal 173 ayat (1) huruf c UU LLAJ pengangkutan dalam hal pengiriman barang harus berbentuk perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin baik itu untuk mengangkut barang

khusus maupun tidak. Jika dikaitkan dengan perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang merupakan perusahaan dibidang teknologi yang menyediakan jasa transportasi, dengan kata lain bukan perusahaan angkutan umum yang dalam hal pengangkutan barang berupa minuman beralkohol ini menggunakan kendaraan milik pribadi yakni mitra go-jek bukan angkutan khusus yang telah terdaftar dan memiliki izin serta perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa ini juga tidak memiliki jenis angkutan barang khusus sebagaimana sudah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian ketentuan penggunaan yang di dalamnya mencantumkan klausula mengenai pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa melalui mitranya dalam hal ini yaitu minuman beralkohol tersebut bertentangan dengan Pasal 173 UU LLAJ. Permasalahan yang muncul berlandaskan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya adalah berkenaan apakah perjanjian ketentuan penggunaan aplikasi antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan, serta apa akibat hukum ketika perjanjian tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan perundang-undangan yang sesuai dengan pelaksanaan pengiriman barang berupa minuman beralkohol serta akibat hukumnya.

Kajian teoritik yang berkenaan dengan perjanjian yang diantaranya meliputi definisi perjanjian, syarat sahnya, asas-asas perjanjian, pengangkutan barang, hubungan hukum dan kedudukan dari perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, dan mengenai definisi minuman beralkohol dan golongan minuman beralkohol.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normative merupakan proses penemuan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2008:129). Penelitian hukum normative bisa disebut penelitian hukum doktrinal, hanya menggunakan sumber hukum sekunder saja, yakni peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, serta pendapat sarjana hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2008:93). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku huku,

jurnal hukum, dan bahan non hukum digunakan untuk pelengkap bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan permasalahan.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dengan mengklasifikasikan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang relevan yang kemudian dikaji sesuai dengan permasalahan. Analisa yang digunakan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul adalah dengan metode preskriptif. Dalam hal ini argumentasi dilakukan oleh peneliti guna membagikan preskripsi atau penilaian perihal benar atau salah atau apa sepatutnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017:184). Analisa hukum dilaksanakan dengan cara melakukan sistematis terhadap bahan hukum yang terkumpul, kemudian memilah dan mengklasifikasikan bahan hukum menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil penelitian tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian apakah sudah sesuai atau belum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus mengenai perjanjian pengangkutan barang berupa minuman beralkohol yang notabennya dapat dikategorikan dalam jenis cairan yang mudah menyala maupun meledak dengan pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang dikirimkan melalui mitra perusahaan yakni *driver Go-Jek*. Perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi bukan perusahaan transportasi atau kurir yang berkantor pusat di Jl. Monginsidi Nomor 14 Surabaya. Dalam perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa terdapat suatu perjanjian ketentuan penggunaan aplikasi yang berlaku sebagai perjanjian sah yang digunakan sebagai pedoman bagi pengguna aplikasi untuk dapat mengakses layanan yang disediakan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Berdasarkan pada angka 28 ketentuan penggunaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dijelaskan bahwa penyedia layanan akan mengirimkan minuman beralkohol untuk pelanggan yang berusia diatas 21 tahun dengan menunjukkan kartu identitas (KTP) untuk diperiksa oleh penyedia layanan pada saat pengiriman.

Berdasarkan pada angka 29 ketentuan penggunaan aplikasi PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa terdapat suatu pernyataan mengenai ketika dalam *pop-up* pemeriksaan usia saat memasuki toko minuman beralkohol ataupun ketika menambahkan minuman beralkohol ke keranjang belanja, maka harus dipastikan telah melebihi batas umur yang sah untuk mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu diatas 21 tahun.

Berdasarkan pada angka 30 ketentuan penggunaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dijelaskan bahwa terdapat jenis golongan minuman beralkohol yang dapat

dikirimkan yaitu Bintang dan Heineken. Dalam hal ini, terjadinya suatu pengiriman barang berupa minuman beralkohol didasarkan atas suatu kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pengguna aplikasi dengan penyedia layanan, dengan adanya syarat dan ketentuan yang sudah dicantumkan yaitu usia pengguna aplikasi yang dapat memesan ataupun mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut harus berusia di atas 21 tahun akan tetapi disini lain barang berupa minuman beralkohol ini merupakan jenis cairan yang dapat dikategorikan pada jenis cairan yang mudah menyala dan meledak, sehingga dalam hal pengangkutannya dalam ketentuan perundang-undangan yaitu UU LLAJ ketika barang tersebut tergolong dalam cairan yang mudah menyala ataupun meledak maka dalam pengangkutannya menggunakan jenis alat angkut khusus. Selain itu, melihat dari segi perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa merupakan perusahaan teknologi bukan perusahaan transportasi. Perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa hanya menyediakan layanan pada bidang transportasi. Ketika berbicara mengenai pengiriman barang berupa minuman beralkohol, terdapat suatu syarat pengiriman barang diantaranya diatur dalam Pasal 168 dan juga Pasal 173 UU LLAJ jika melihat dari pengiriman maka yang dapat mengirimkan barang disini hanya perusahaan yang memang bergerak pada bidang transportasi dan memiliki izin dalam hal angkutan barang. Jika melihat dari PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, maka perusahaan tersebut tidak dapat melakukan pengiriman barang berupa minuman beralkohol karena yang notabennya PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa merupakan perusahaan teknologi yang mana bukan merupakan perusahaan angkutan dan juga tidak memiliki izin dalam hal ini yaitu pengangkutan barang.

Pencantuman pada ketentuan penggunaan tersebut dilakukan karena didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian, yang menyatakan bahwa para pihak dapat membuat perjanjian apapun asalkan tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.

Selanjutnya, terdapat suatu pengaturan mengenai angkutan yang digunakan untuk mengangkut barang khusus yang notabennya minuman beralkohol merupakan cairan yang mudah menyala ataupun meledak. Berdasarkan suatu penelitian terdapat suatu senyawa yang terkandung dalam minuman beralkohol diantaranya yaitu senyawa etanol atau etil alkohol. Senyawa ini merupakan obat psikoaktif dan dapat ditemukan pada minuman beralkohol. Dalam sejarahnya etanol atau etil alkohol telah lama digunakan sebagai bahan bakar, karena etanol atau etil alkohol memiliki sifat mudah terbakar dengan api yang berwarna biru, sehingga sering digunakan sebagai bahan bakar. Melihat dari sifat senyawa yang terdapat dalam

minuman beralkohol, terdapat suatu ketentuan yaitu Pasal 160 UU LLAJ yang menjelaskan bahwa “Angkutan barang khusus adalah angkutan yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan alat berat serta membawa barang berbahaya antara lain : a. barang yang mudah meledak, b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu, c. cairan yang mudah menyala, d. padatan mudah menyala, e. bahan penghasil okisdan, f. racun dan bahan yang mudah menular, g. barang yang bersifat radioaktif, h. barang yang bersifat korosif.

Berdasarkan ketentuan di atas, dengan adanya kategori jenis barang yang dapat diangkut dengan angkutan khusus maka yang mencantumkan mengenai minuman beralkohol yang sebenarnya tidak hanya dalam batasan umur saja melainkan juga melihat dari segi alat angkutnya yang mana minuman beralkohol ini merupakan jenis cairan yang mudah menyala ataupun meledak yang dapat merugikan salah satu pihak, selain itu juga minuman ini juga termasuk jenis minuman yang ada di bawah pengawasan pemerintah. Sehingga ketentuan tersebut yang terdapat dalam pembuatan perjanjian ataupun ketentuan penggunaan aplikasi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan permasalahan pencantuman mengenai penyedia layanan dapat mengirimkan minuman beralkohol dengan batas umur saja yaitu lebih dari 21 tahun padahal dari segi alat angkutnya PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak memiliki jenis angkutan khusus karena pada dasarnya PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa bukan perusahaan pada bidang transportasi ataupun kurir melainkan perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi yang menyediakan jasa pada bidang transportasi. Sehingga pencantuman tersebut merupakan suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU LLAJ. Artinya, bahwa pencantuman tersebut dapat nilai sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa selaku pengusaha penyedia layanan.

Perjanjian Ketentuan Penggunaan Aplikasi Antara Konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Atas Pengiriman Barang Berupa Minuman Beralkohol Tidak Sesuai Dengan UU LLAJ

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah didapat, bahwa pada angka 28, 29, serta 30 dalam perjanjian antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang memuat mengenai pengiriman minuman beralkohol yang hanya memberikan batasan pada umur saja tanpa melihat dari sisi lain yang perlu diperhatikan. Pencantuman tersebut sebenarnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang tercantum pada Pasal 1338 KUHPerdata. Adapun pengguna aplikasi yang telah menyepakati isi dari

perjanjian yang telah disediakan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa maka dapat dinyatakan berlaku sebagai undang-undang berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Jika ditinjau dari sisi lain, ketentuan pada Pasal 168 UU LLAJ menyatakan bahwa “ (1) Perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat barang sebagai bagian dokumen perjalanan, (2) Perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan kedudukan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tersebut merupakan perusahaan teknologi bukan perusahaan angkutan umum yang dapat mengirimkan barang. Sedangkan dalam UU LLAJ syarat untuk dapat mengirimkan barang diwajibkan perusahaan angkutan umum sedangkan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa bukan perusahaan angkutan umum yang dapat melakukan pengiriman barang. Sehingga perjanjian yang mencantumkan mengenai pengiriman barang dalam hal ini berupa minuman beralkohol dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 168 UU LLAJ.

Selanjutnya jika ditinjau dari ketentuan Pasal 173 ayat (1) huruf c UU LLAJ yang menyatakan bahwa “perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.” Dilihat dari ketentuan tersebut yang menjelaskan mengenai syarat yang harus dipenuhi yaitu memiliki izin penyelenggaraan dalam pengiriman barang khusus atau alat berat dan juga perusahaan berbentuk perusahaan angkutan, maka PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang bergerak pada perusahaan teknologi tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan pengiriman barang dalam hal ini minuman beralkohol.

Merujuk pada Pasal 160 UU LLAJ yang menjelaskan mengenai angkutan khusus serta kategori barang yang diangkut menggunakan angkutan khusus yang mana minuman beralkohol ini masuk dalam jenis barang dengan kategori cairan yang mudah menyala dan meledak sebagaimana diatur dalam Pasal 160 UU LLAJ. Sehingga dalam hal pengiriman barang harus menggunakan angkutan khusus. Padahal PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak memiliki persyaratan yang harus dipatuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 168 dan Pasal 173 UU LLAJ.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa terdapat suatu problematika hukum berupa konflik norma antara pencantuman pada perjanjian antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa mengenai batasan pengiriman minuman beralkohol dengan ketentuan UU LLAJ. Perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang

mencantumkan ketentuan penggunaan mengenai pengiriman minuman beralkohol tersebut dinilai tidak mematuhi untuk memenuhi angkutan khusus dalam hal mengirimkan berupa barang yang dimungkinkan dalam pengangkutannya menggunakan alat angkut khusus.

Perusahaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa bukan perusahaan yang bergerak pada bidang transportasi, melainkan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi yang menyediakan jasa transportasi seperti mengantarkan barang ataupun orang dari satu tempat ke tempat tujuan dengan keadaan selamat. Melihat dari hal tersebut, dari segi alat angkutnya mitra *go-jek* dalam mengantar baik orang atau barang menggunakan kendaraan milik pribadi, bukan milik perusahaan. Selain itu, dalam hal pengangkutan barang, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa ini tidak memiliki suatu ketentuan yang memayungi adanya pengangkutan barang apalagi barang tersebut dapat di kategorikan barang yang dalam hal pengangkutannya menggunakan jenis alat angkut khusus sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu pada pasal 160 UU LLAJ.

Jadi, melihat ketentuan perundang-undangan yang ada maka dalam hal pengangkutan barang tidak serta merta melihat suatu pengangkut dalam hal ini mitra *go-jek* yang menggunakan kendaraan milik pribadi, selain itu juga dari segi syarat dari perusahaan yang diharuskan memiliki izin dan juga yang mengangkut barang juga wajib dari perusahaan angkutan. Karena melihat jenis barang yang diangkut merupakan barang yang dalam mengangkutnya menggunakan angkutan khusus, karena di dalam minuman beralkohol terdapat suatu cairan kimia yaitu etanol atau bisa disebut sebagai etil alkohol yang pada dasarnya memiliki sifat yang mudah menyala, terbakar dan mudah meledak karena etanol atau etil alkohol ini biasanya digunakan pada bahan bakar. Melihat dari sifat cairan etanol atau etil alkohol tersebut, memang PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa bukan perusahaan transportasi akan tetapi dalam hal pencantuman klausula mengenai pengiriman barang berupa minuman beralkohol ini juga melihat dari segi ketentuan yang ada. Se jauh ini juga PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa memiliki suatu aturan yang memayunginya yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Hal ini nampak dalam ketentuan tersebut secara keseluruhan tidak adanya suatu ketentuan mengenai pengiriman berupa barang, hanya saja lebih mengkhususkan dalam hal pengangkutan orang saja.

Dalam hal ini, perjanjian yang dibuat oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan penggunaanya berpedoman pada Pasal 1338 KUHPerdara sebagaimana berbunyi

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pasal 1338 KUHPerdara di atas mencerminkan asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak dapat membuat perjanjian apapun asalkan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sah perjanjian. pasal tersebut juga mencerminkan asas *pacta sunt servanda*, dimana perjanjian yang telah disepakatai dan sah, maka sifat daripada perjanjian tersebut ialah mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak dan pihak ketiga harus menghormati perjanjian tersebut sebagaimana perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka timbullah suatu problematika hukum yakni konflik norma antara perjanjian antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atas pengiriman minuman beralkohol dengan UU LLAJ. Adapun perjanjian tersebut yang itu merupakan perjanjian dan UU LLAJ mempunyai kedudukan yang sama yakni sebagai undang-undang. Selain itu, dengan pengertian “ berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan para pihak dalam perjanjian yang sejajar dengan pembuat undang-undang (Agus Yudha Hernoko, 2008:127). Dengan demikian, konflik norma tersebut tidak serta merta dapat diselesaikan dengan asas preferensi, hal ini dikarenakan perjanjian antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa merupakan bentuk perjanjian, maka juga dapat dikaji yang didasarkan pada asas-asas perjanjian yang relevan.

Timbulnya konflik norma tersebut manakala dikaji berdasarkan pada asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka perjanjian yang telah disediakan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan penggunaannya mempunyai kekuatan mengikat sehingga berlakulah asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1338 KUHPerdara. Hal tersebut berarti kedudukan perjanjian konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa menjadi sejajar dengan UU LLAJ.

Berlakunya asas *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dalam hal pengiriman minuman beralkohol tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, dimana ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara tersebut tergolong bersifat umum. Hal ini terlihat pada kata “semua perjanjian...”, yang berarti bahwa ketentuan dalam Pasal 1338 mengakomodir semua bentuk perjanjian termasuk dalam perjanjian konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa mengenai pengiriman minuman beralkohol.

Sedangkan dalam UU LLAJ mengatur lebih rinci dalam hal yang berkenaan dengan pengangkutan, baik itu jenis barang baik yang umum maupun khusus, serta jenis alat angkutnya. Jadi, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU LLAJ lebih khusus mengatur mengenai hal pengangkutan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang diatur dalam UU LLAJ lebih khusus dibandingkan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara, hal ini dapat diberlakukan asas *lex specialis derogate legi generalis*, dimana UU LLAJ sebagai ketentuan yang lebih khusus mengalahkan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara sebagai ketentuan yang lebih umum.

Kesepakatan para pihak berdasarkan perjanjian konsumen yang dibuat oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dinilai tidak memenuhi salah satu asas yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik tidak terpenuhi disebabkan perjanjian ketentuan penggunaan aplikasi berbentuk perjanjian baku yang dibuat dan ditentukan terlebih dahulu oleh pengusaha yaitu PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang membolehkan mengirimkan minuman beralkohol dengan tidak melihat dari segi alat angkutnya. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan juga bertentangan dengan Pasal 173 UU LLAJ yang mana maksud dari tersebut hanya menyantumkan syarat bahwa batasan umur yang melebihi 21 tahun dapat dikirimkan minuman beralkohol, padahal minuman beralkohol ini dapat dikategorikan pada jenis cairan yang mudah menyala ataupun meledak jika dalam hal pengangkutannya tidak memperhatikan jenis alat angkutnya yang seharusnya menggunakan alat angkut khusus, sedangkan dari PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak memiliki izin untuk penyelenggaraan pengiriman barang dan tidak memiliki jenis alat angkutnya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari segi asas-asas dalam hukum perjanjian, asas preferensi maupun dari segi ketentuan UU LLAJ, maka perjanjian penggunaan aplikasi antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan penggunaannya yang mencantumkan mengenai pengiriman minuman beralkohol yang hanya dalam batasan umur saja melainkan masih ada yang harus diperhatikan yaitu jenis alat angkutnya tidak sesuai ketentuan yang ada yaitu UU LLAJ.

Akibat Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Perjanjian Ketentuan Penggunaan Aplikasi Antara Konsumen Dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Atas Pengiriman Barang Berupa Minuman Beralkohol

Akibat hukum berkaitan erat dengan perbuatan hukum dimana semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum pasti menimbulkan suatu akibat hukum.

Adapun pengertian akibat hukum yaitu suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (R. Soeroso, 2009:29). Dalam bidang pengangkutan, akibat hukum timbul dari adanya suatu hubungan hukum baik pengirim dengan penerima barang, dimana akibat hukum tersebut selanjutnya menimbulkan hak dan kewajiban sebagai prestasi yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Perjanjian didasarkan pada kesepakatan yang nantinya akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai prestasi yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Berkenaan dengan hal tersebut, perjanjian antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa juga menimbulkan akibat hukum secara keperdataan, dimana para pihak yang telah menyepakati perjanjian tersebut saling terikat satu sama lain, sehingga dari keterkaitan tersebut muncul keberlakuan bahwa perjanjian tersebut layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Adapun dalam perjanjian konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa telah mencantumkan suatu mengenai pengiriman barang berupa minuman beralkohol yang mana pencantuman tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 dan Pasal 173 UU LLAJ.

Ketentuan yang diatur dalam UU LLAJ mengandung kaidah hukum yang bersifat memaksa, artinya bahwa ketentuan tersebut wajib dipatuhi dan ditaati secara mutlak serta tidak dapat dikesampingkan dengan cara dan alasan apapun. Berkenaan dengan pencantuman tersebut dalam perjanjian konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, maka perjanjian tersebut tidak dapat diterapkan dan dianggap tidak pernah ada, sebagaimana hal tersebut disebabkan tersebut bertentangan dengan UU LLAJ.

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya bahwa perjanjian yang dibuat dan disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata merupakan akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak, artinya bahwa ketentuan tersebut tidak terlepas dari ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Suatu perjanjian yang telah sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak selaku pembuatnya, artinya bahwa para pihak harus mengindahkan dan mentaati undang-undang. Jika salah satu pihak ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, maka pihak yang melanggar tersebut dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang nantinya menimbulkan akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum (Muhammad Abdulkadir, 2013:97). Hal ini berarti bahwa barangsiapa melanggar perjanjian yang ia buat, maka ia akan mendapat

hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi salah satu unsur yakni itikad baik. Pelaksanaan dengan itikad baik terdiri dari 2 (dua) macam, yakni sebagai unsur subjektif dan sebagai ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan. Dalam hukum benda, unsur subjektif berarti “kejujuran” atau “kebersihan” si pembuatnya, namun dalam pasal 1338 ayat (3) BW bukanlah dalam arti unsur subjektif ini, melainkan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mematuhi norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Adapun yang dimaksud dengan itikad baik di sini lebih mengarah pada ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu, sedangkan yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu, undang-undang pun tidak memberikan perumusannya, karena itu tidak ada ketepatan batasan pengertian istilah tersebut. Jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan, sedangkan kesusilaan artinya kesopanan, keadaban. Itikad baik dapat diartikan pula bahwa dalam melaksanakan haknya, seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Hal ini berarti bahwa unsur kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab, sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.

Berkenaan dengan permasalahan pencantuman mengenai pengiriman minuman beralkohol dalam perjanjian konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, terdapat unsur yang mengatur mengenai syarat sah perjanjian di dalam pasal 1320.

Syarat sahnya suatu perjanjian tersebut di atas dibagi menjadi 2 hal, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif meliputi kesepakatan kedua belah pihak dan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, maksudnya dalam adalah perjanjian tersebut dilaksanakan dengan kemampuan atau kecakapan para pihak yang dikatakan mampu atau cakap menurut hukum dalam membuat suatu perjanjian. syarat objektif meliputi adanya isi dari perjanjian yang dijanjikan dan tentang isi perjanjian yang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sehingga dalam hal ini menimbulkan hubungan timbal balik. Apabila dihubungkan dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 angka 4 KUHPerdata yaitu mengenai “suatu sebab yang halal”, sebagaimana hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.” Artinya, bahwa pencantuman tersebut

merupakan yang mengandung sebab terlarang, dimana makna daripada pencantuman tersebut yaitu penyedia layanan memperbolehkan mengirimkan minuman beralkohol tanpa melihat jenis alat angkutnya karena minuman beralkohol ini merupakan jenis cairan yang mudah menyala dan meledak yang dalam proses pengirimannya menggunakan alat angkutan khusus sedangkan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak memiliki izin penyelenggaraan pengiriman barang khusus dalam hal ini barang berupa minuman beralkohol, sebagaimana diatur dalam Pasal 173 UU LLAJ.

Berkenaan dengan uraian di atas, bahwa pencantuman mengenai pengiriman minuman beralkohol dengan hanya mensyaratkan umur saja melainkan jenis alat angkutnya tidak memadai maka dinilai telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yang merupakan bagian dari syarat objektif, dan juga tidak memenuhi syarat sahnyanya perjanjian, maka hal tersebut berakibat pada batal demi hukum atau *null and void* sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata. Ketentuan batal demi hukum berarti suatu perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

PENUTUP

Simpulan

Perjanjian antara konsumen dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang mencantumkan mengenai pengiriman minuman beralkohol tanpa melihat jenis alat angkutnya tidak sesuai dengan ketentuan UU LLAJ, terkhusus bertentangan dengan Pasal 168 dan Pasal 173 UU LLAJ. Dalam hal ini ketentuan dalam UU LLAJ yang bersifat memaksa yang mana harus diataati secara mutlak, dengan artian bahwa ketentuan tersebut harus dipatuhi dan wajib dilaksanakan tanpa ada alasan apapun untuk menyimpanginya.

Akibat hukum daripada Perjanjian ketentuan penggunaan antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan pengguna yang di dalamnya mencantumkan mengenai pengiriman barang berupa minuman beralkohol yang hanya membatasi pada umur saja melainkan masih ada batasan lainnya yaitu jenis alat angkutnya berdasarkan KUHPdata dan UU LLAJ ialah batal demi hukum.

Saran

Dalam hal pelaku usaha yaitu PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dalam hal pembuatan suatu perjanjian ketentuan penggunaan lebih memperhatikan dalam hal jenis dan kategori barang yang akan diangkut. Hal ini dikarenakan ketika melihat dari jenis atau kategori barang yang dapat dikategorikan barang yang berbahaya maka dalam hal pengangkutannya juga harus memperhatikan jenis alat angkutnya yaitu menggunakan alat angkut khusus untuk

menghindari terjadinya hal yang memang tidak diinginkan ketika pengiriman barang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2015. *Analisis Kebutuhan Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Asikin, Zainal. 2016. *Hukum Dagang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asrori, Hudi.H.M. 2010. *Mengenal Hukum Pengangkutan Udara*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bakri, Muhammad. 2011. *Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*. Malang: UB Press.
- D, Familia. 2010. *Seluk beluk dan Fakta Disfungsi Seksual Yang Wajib Anda Ketahui (Cetakan I)*. Yogyakarta: A Plus Books.
- Fajar, Mukti. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Fajar.
- Fuady, Munir. 2007. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuller, Lon L. 1969. *The Morality Of Law*. London: Yale University.
- Goesniadhie, Kusnu. 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum (Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik)*. Malang: Nasa Media.
- Go-Jek. 2017. *Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi*. (online). (<https://www.go-jek.com/terms-and-condition/>). Diakses pada 17 Januari 2018 pukul 01.18 WIB.
- Go-Jek. 2017. (<https://join.go-jek.com/go-ride>). Diakses pada 26 Maret 2018 pukul 22.38.
- Go-Jek. 2017. *Layanan Go-Jek*. (online). (<https://www.go-jek.com>). Diakses pada 26 Maret 2018 pukul 22.50
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hernoko, Agus Yudha. 2008. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama
- H.S, Salim. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innomaniaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil.C.S, T. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Muhammad, Abdulkadir. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miru, Ahmadi. 2010. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ningrum, Lestari. 2004. *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurmandi, Ahcmad. 2014. *Manajemen Perkotaan*. Yogyakarta: JKSG UMY.
- Purwosutjipto, H.M.N. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia II*. Jakarta: Djambatan.
- Pustaka Balai. 2007. [http://kbbi.web.id/angkut.\(online\)](http://kbbi.web.id/angkut.(online)). Diakses pada 21 Maret 2018 pukul 21.17 WIB.
- Prabowo, M.Shidqon dan Pujiono. 2016. *Hukum Dagang*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta.
- R.Djatmiko. 1996. *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Bandung: Angkasa.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Malang: Setara Press.
- Soeprapto, Farida Indrati. 2010. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisus.
- Soeroso, R. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Usman, Sution. 1991. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widagdo, Setiawan. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Yahyanto dan Lukman, Santoso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474
- Perjanjian antara Konsumen Dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa.